

**Perjalanan Maraton Menuju 2030:
Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pasca 2015 dari Sisi Pemikiran Ekofeminisme¹**

Paulus Eko Kristianto
Alumni Program Magister Ilmu Filsafat STF Driyarkara
Email: paulusekokristianto@gmail.com

Abstract

Sustainable development is a shared agenda. This is done in order to improve the quality of Indonesia for the better. One of the focuses of sustainable development is the environment. This article presents a reflection of sustainable development from the perspective of ecofeminism. This reflection is built through library research on related books and journals. The results of this study indicate that the environment is not a victim of the satisfaction of human desires alone (anthropocentric). The thoughts of the philosophers of ecofeminism can be used as an alternative to alarm in carrying out this mission, although in it there are still pros and cons in viewing the relationship between nature and women.

Keywords: sustainable development, environment, ecofeminism, Indonesia, 2030

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda bersama. Hal ini dilakukan guna memperbaiki kualitas Indonesia menjadi lebih baik. Salah satu fokus pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan hidup. Artikel ini menyajikan refleksi pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekofeminisme. Refleksi ini dibangun melalui penelitian pustaka terhadap buku dan jurnal terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak menjadi korban atas pemuasan

¹Penentuan judul artikel ini diinspirasi oleh ulasan artikel Ismid Hadad. "Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015: Perjalanan Maraton Menuju SDGs 2030." *Jurnal Prisma*, Vol. 35, No. 2, 2016, h. 3-36.

hasrat manusia semata (antroposentris). Pemikiran para filsuf ekofeminisme bisa dijadikan alternatif alarm dalam mengemban misi tersebut, walaupun di dalamnya masih terdapat pro dan kontra dalam memandang hubungan alam dan perempuan.

Keywords: pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, ekofeminisme, Indonesia, 2030

Paulus Eko Kristianto adalah Alumni Program Magister Ilmu Filsafat STF Driyarkara

Pendahuluan

Filsafat lingkungan hidup diharapkan tidak hanya merenungkan dan mengembangkan konsep-konsep di ruang sunyi atau kelas-kelas saja. Namun, filsafat lingkungan hidup diharapkan berjalan-jalan dalam persoalan keseharian dan memberikan alternatif sumbangan pemikiran dalam konteksnya. Oleh karenanya, penulis melihat urgensi ini turut teraktualkan kala melihat sejumlah fakta diberikannya pekerjaan rumah atas luncuran agenda pembangunan 2030. Seperti yang kita ketahui, tahun 2015 merupakan ujung berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*, MDGs) yang dimulai pada awal tahun 2000. MDGs bertujuan menghapus kemiskinan dan kelaparan dari muka bumi. Sejak September 2015, Sidang Umum PBB memutuskan untuk melanjutkan upaya tersebut dengan Agenda Pembangunan 2030 yang lebih komprehensif, yaitu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) sebagai agenda pembangunan global Pasca 2015.²

Munculnya gagasan dan konsep “Pembangunan Berkelanjutan” merupakan reaksi ketidakpuasan terhadap pola dan praktik pembangunan yang dianggap gagal setelah tiga dasawarsa diterapkan di Dunia Ketiga. Kekecewaan terhadap pola pembangunan dekade 1960-1970-an tersebut diikuti berbagai gerakan sosial dan para cendekiawan di berbagai negara yang melakukan aksi penolakan terhadap model pembangunan yang tidak peduli lingkungan dan mengabaikan kondisi

² Lihat The United Nations Sustainable Development Summit 2015, High Level Plenary Meeting of the UN General Assembly, New York, 25-27 September 2015.

sosial masyarakat miskin yang justru makin tersisihkan oleh pembangunan itu.³ Berpijak pada uraian ini, bagaimana sumbangsih filsafat lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan? Karena luasnya pembahasan filsafat lingkungan hidup, penulis memfokuskan diri pada gagasan ekofeminisme. Karen J. Warren menunjukkan asumsi dasar Ekofeminisme terletak pada⁴; (1) Ada keterkaitan penting antara opresi terhadap perempuan dan alam; (2) Pemahaman terhadap alam dalam keterkaitan ini menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman yang memadai atas opresi terhadap perempuan dan alam; (3) Teori dan praktik feminis harus memasukkan perspektif ekologi; dan (4) Pemecahan masalah ekologi harus menyertakan perspektif feminis.

Lantas, bagaimana ekofeminisme memberikan sumbangsih terobosan bagi pembangunan berkelanjutan? Paper ini mencoba menelitinya lebih jauh secara deskriptif-analitis melalui sistematika berikut; (1) Tiga Dasawarsa Pembangunan yang Mengecewakan (1960-an, 1970-an, dan 1980-an); (2) Pemahaman Paradigma Pembangunan Berkelanjutan; (3) Penyintasan Pemikiran Ekofeminisme: Dari Akar Pemikiran hingga Kritik terhadapnya; (4) Implikasi Filosofis Pemikiran Ekofeminisme bagi Pembangunan Berkelanjutan; (5) Strategi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tiga Dasawarsa Pembangunan yang Mengecewakan (1960-an, 1970-an, dan 1980-an)

Selepas dari deklarasi kemerdekaannya, para negara berkembang terpacu membangun negeri dan menyejahterakan rakyat melalui pembangunan ekonomi. Pada tahun 1945-1960-an inilah, kita mulai diperkenalkan istilah “pembangunan” bagi negara berkembang. Pembangunan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk yang sebagian terbesar masih berpenghasilan rendah. Hal ini ditentukan melalui parameter “pendapatan nasional” (*Gross National Product* (GNP)). GNP dihitung dari jumlah produksi nasional barang

³ Ismid Hadad. “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015”, h. 10.

⁴ Lihat Karen J. Warren. “Feminism and Ecology” dalam *Environmental Review* 9, No. 1 tahun 1987, h. 3-20. Dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), h. 366.

dan jasa yang bisa dihasilkan negara tersebut dalam satu tahun, atau dari besarnya penghasilan rata-rata per orang (*income per capita*) yang dihitung dari jumlah GNP dibagi rata dengan jumlah penduduk, baik yang kaya dan miskin. Dengan demikian, istilah “pembangunan” masih diberi makna secara sempit sebagai pertumbuhan ekonomi. Guna mengetahui mekanisme pembangunan, kita dapat memperhatikan uraian berikut.

1. Dasawarsa Pembangunan Pertama (tahun 1960-an)

Sekitar tahun 1960-an, banyak negara berkembang menyatakan kemerdekaannya. Kemudian, mereka masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ternyata, banyak di antara negara-negara tersebut tergolong sebagai negara miskin. Oleh karenanya, pada tahun 1961, atas usulan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, PBB perlu menetapkan dasawarsa pembangunan. Dasawarsa ini dilakukan dengan mengupayakan melakukan akselerasi pembangunan melalui menaikkan pendapatan nasional masing-masing hingga mencapai pertumbuhan setidaknya sebesar lima persen per tahun pada tahun 1970.⁵ Di sisi lain, negara-negara maju turut menggelar bantuan dana minimal satu persen dari jumlah GNP bagi mereka. Melalui adanya tindakan ini, kita mengenal model bantuan pembangunan luar negeri/ internasional disebut *Overseas Development Assistance* (ODA). Guna menunjang model bantuan pembangunan tersebut, PBB membentuk organisasi bantuan pangan sedunia dengan nama *World Food Programme* (WFP) pada 1961, organisasi perdagangan dan pembangunan atau *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pada 1964, dan organisasi untuk pembangunan dan pengembangan industri atau *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) pada 1966.

2. Dasawarsa Pembangunan Kedua (tahun 1970-an)

Laju pembangunan dasawarsa pertama dinilai cukup membuahkan hasil. Namun di sisi lain, banyak negara berkembang merasa kecewa atas bantuan yang diberikan dan malah melihatnya sebagai masalah baru. Hal ini ditengarai pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak diiringi pemerataan penghasilan dalam masyarakat, dan justru menciptakan

⁵ Ismid Hadad. “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015”, h. 8.

lebih banyak pengangguran tenaga kerja kurang terdidik dan berpenghasilan rendah sehingga menimbulkan berbagai masalah kesenjangan ekonomi, keadilan sosial, dan konflik sosial-politik di kalangan masyarakat negara berkembang.⁶ Sebagai respon terhadapnya, Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labor Organization*) gencar mempersoalkan isu pengangguran dan kesempatan kerja. Di sisi lain, negara-negara maju yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)) justru menurunkan target bantuan pembangunan internasionalnya (ODA) semula satu menjadi 0,7 persen dari jumlah GNP mereka. Melihat hal ini, para pakar ekonomi internasional dalam PBB mulai menyuarakan “Tata Ekonomi Internasional Baru” (*New International Economic Order*) guna merombak sistem ekonomi dunia yang dinilai timpang.

Strategi tersebut dicanangkan sebagai dasawarsa pembangunan kedua dengan ditengarai pergeseran pembangunan pertumbuhan ekonomi menuju pemerataan pembangunan negara-negara berkembang. Sejarah mencatat Indonesia pun mengadopsi strategi pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan pembangunan tersebut melalui Repelita Kedua. Setidaknya, kegentingan ini dipicu oleh membumbungnya harga minyak bumi pada 1973-1974 yang disusul krisis ekonomi keuangan 1978-1979 berakibat banyak negara harus menanggung beban hutang. Oleh karenanya, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia mulai terlilit oleh hutang.

3. Dasawarsa Pembangunan Ketiga (tahun 1980-an)

Berbicara dasawarsa pembangunan ketiga, Amerika Latin dan Afrika Sahara kerap menyebutnya sebagai “dasawarsa pembangunan yang hilang” (*the lost decade for development*). Hal itu disebabkan beban hutang, inflasi, dan defisit anggaran pembangunan dalam negeri yang terlalu tinggi. Guna keluar dari jerat tersebut, banyak negara berkembang mulai meminjam pada *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Namun, kedua lembaga ini memberi diiringi dengan sanksi dan persyaratan yang ketat dengan alasan proses stabilisasi keuangan jangka pendek dan penerapan kebijakan makro jangka panjang. Dengan

⁶ *Ibid.*

kata lain, kondisi demikian bisa dikatakan sebagai proses liberalisasi perekonomian, investasi, dan perdagangan di berbagai negara. Sebab, peran negara ditekan sekecil mungkin dan peran pasar dikembangkan semaksimal mungkin.⁷ Negara berkembang mengambil langkah pendek. Hal itu ditengarai alokasi anggaran pemerintahnya guna pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, peningkatan kesempatan kerja, dan lingkungan hidup banyak dipangkas. Akibatnya, kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, dan penanganan kerusakan lingkungan semakin terabaikan.

Berpijak pada uraian tiga dasawarsa di atas, pengalaman dunia menunjukkan pembangunan cenderung terpusat pada pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan aspek keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Maka, berbagai ketimpangan mulai terjadi. Hal itu ditandai pada distribusi pendapatan antar negara dan dalam negeri sehingga membangkitkan kekecewaan dan menimbulkan banyak reaksi. Salah satu reaksi tersebut dinyatakan melalui program pembangunan berkelanjutan. Program ini banyak berfokus pada manusia dan lingkungan hidupnya. Untuk lebih jelas, hal ini dapat diperhatikan pada bagian berikutnya.

Pemahaman Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Bila kembali dari akarnya, kata “keberlanjutan” (*sustainable*) berasal dari konsep ekologi dalam ilmu pengetahuan alam, khususnya berkenaan dengan menjaga integritas ekosistem. Kemudian, kata “keberlanjutan” banyak dipinjam oleh para juru runding ekonomi dan politik aras internasional dalam konteks pembangunan tahun 1972, khususnya pada Konferensi Stockholm dalam bahasan pembangunan dan lingkungan hidup.⁸ Konferensi ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari keputusan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) tahun 1968-1969 guna melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil Program Pembangunan Dasawarsa Pertama (1960-1970-an), dan sekaligus merumuskan strategi pembangunan bagi Program Dasawarsa Kedua (1970-1980-an). Setidaknya, deklarasi dan rencana implementasi Stockholm telah mendorong berbagai negara maju membuat legislasi, kebijakan, dan program domestik guna perbaikan

⁷ Ismid Hadad. “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015”, h. 9.

⁸ *Ibid.*

kualitas air, udara, dan perlindungan terhadap bahan berbahaya dan beracun di negara masing-masing. Selain itu, berbagai prakarsa internasional melalui pertemuan, perjanjian, dan konvensi penyelamatan lingkungan hidup mulai dicanangkan di antaranya⁹;

[1] Konvensi London untuk Pencegahan Polusi Laut dari Limbah Nuklir dan Toksin (1972), [2] Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal Laut (MARPOL, 1973), [3] Konferensi Kependudukan PBB yang pertama dan kedua (1974/1984), [4] Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS, 1982) untuk penetapan wilayah yurisdiksi sejauh 200 mil dari perairan pantai, [5] Moratorium Penangkapan Ikan Paus untuk Keperluan Komersial (1982), [6] Protokol Montreal tentang zat-zat kimiawi yang membuat penipisan lapisan ozon (1987), [7] Pembentukan forum Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) oleh UNEP dan WMO (1988), [8] Konvensi Basel tentang Pengendalian Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dalam Pergerakan Lintas Batas (1989), dan [9] Perjanjian AS dan Kanada tentang Kualitas Udara untuk mengurangi sulfurdioksida sebagai penyebab hujan asam (1991), dan [10] Protokol Proteksi Kawasan Antartika untuk 50 tahun moratorium eksplorasi berkaitan dengan mineral dan perkembangannya.

Berbagai pertemuan dan konvensi di atas telah menunjukkan bahwa komunitas internasional mulai menunjukkan kepedulian pada alam dan lingkungan. Walaupun, kita mungkin melihat masih ada celah di mana isu energi dan kehutanan dalam kaitannya dengan perubahan iklim belum terbahaskan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ternyata memasukkan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan di tingkat kabinet dengan membentuk portofolio Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH).¹⁰ Sejalan dengan itu, definisi “pembangunan berkelanjutan” ternyata baru digunakan secara resmi dan luas oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (*The UN World Commission on Environment and Development/ WCED*) pada 1987.¹¹ Komisi ini turut dianggotai Emil Salim selaku perwakilan dari Indonesia. Dalam penyusunannya, komisi ini menunjukkan pembangunan berkelanjutan merupakan model pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.¹² Dalam perjalanannya, definisi tersebut diadopsi KTT Bumi di Rio de Janeiro pada 1992. Dalam

⁹ Ismid Hadad. “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015”, h. 14.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ismid Hadad. “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015”, h. 11.

¹² Gro Harlem Brundtland dan The World Commission on Environment and Development. *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. (UK: Oxford University Press, 1987), h. 16 dikutip Ismid Hadad. “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015”, h. 11.

KTT tersebut, lingkungan dan pentas makro-ekonomi dan politik global telah berubah secara signifikan. Setidaknya, mereka mulai sadar karena kelemahan dua dasawarsa pembangunan dengan hasil-hasil pembangunan yang mengecewakan banyak negara berkembang. Selain itu, berbagai temuan ilmiah terkait pemanasan global dan perubahan iklim serta dampaknya terhadap ekologi, lingkungan, kesehatan, dan pertanian semakin gencar dikemukakan oleh para ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan media. Berbagai upaya ini ternyata telah membuahkan hasil di antaranya terselenggara¹³;

[1] Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/ CBD), [2] Konvensi Kerangka Kerja (untuk penanggulangan) Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/ UNFCCC), [3] Pernyataan Prinsip-prinsip Konservasi dan Pengelolaan Hutan secara Lestari (*Statement of Principles for Management, Conservation, and Sustainable Development of All Types of Forest*), [4] pembentukan Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (United Nations Commission on Sustainable Development/ UN-CSD), dan [5] mulai dijalankannya “Fasilitas untuk Lingkungan Global” (*Global Environment Facility* (GEF)) yang berfungsi memfasilitasi bantuan dan investasi kegiatan yang bertujuan untuk proteksi dan pelestarian lingkungan di negara-negara sedang berkembang.

Berpijak pada uraian di atas, pertanyaan yang muncul adalah “Bagaimana konsep mendasar pembangunan berkelanjutan itu?” Jeffrey Sachs menunjukkan pemaknaan pembangunan berkelanjutan kerap dituangkan dalam tiga kerangka yaitu¹⁴; *Pertama*. Pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka pandangan normatif dan etis guna merumuskan tujuan pembangunan yang diinginkan di masa depan. Setidaknya, tujuan ini hendak mencapai kesinambungan dan keadilan antar generasi termasuk dalam kerangka pandangan untuk menegakkan etika, kaidah, dan norma-norma pembangunan yang baik dan benar guna menyelamatkan bumi dan generasi mendatang. *Kedua*. Pembangunan berkelanjutan sebagai pola pikir dan pendekatan holistik guna melihat saling keterkaitan, sinergi, dan keterpaduan dalam sinergi guna mengintegrasikan tiga dimensi dan pilar utama pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi, keadilan, inklusi sosial, dan keberlangsungan fungsi lingkungan. *Ketiga*.

¹³ United Nations Publication, Sales No. E. 93.1.11, 1993. *Agenda 21: Program of Action for Sustainable Development and Rio Declaration on Environment and Development*. dikutip Ismid Hadad. “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015”, h. 15.

¹⁴ Lihat Jeffrey D. Sachs. *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015) dikutip Ismid Hadad. “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015”, h. 11-12.

Guna melengkapi unsur tujuan dan kaidah normatif melalui pendekatan holistik, pembangunan berkelanjutan perlu dilengkapi dengan berbagai prinsip dan dimensi pembangunan *good governance*. Bila dibandingkan dengan MDGs tahun 2000-2015, SDGs 2015-2030 diharapkan memiliki ciri khas tertentu. Secara detail, hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut¹⁵;

MDGs 2000-2015	SDGs 2015-2030
50 persen Target dan sasarannya adalah separuh: mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya.	100 persen Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas • Mengakhiri kemiskinan. • Seratus persen penduduk memiliki akta kelahiran. • Memerlukan fokus untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjatuh.
Dari negara maju, untuk negara berkembang MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu, negara maju mendukung dengan penyediaan dana.	Berlaku universal SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.
Dari Atas (top down) Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD di New York tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga.	Dari Bawah (bottom up) dan Partisipatif Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga.
Solusi Parsial atau Tambal Sulam	Solusi Menyeluruh

¹⁵ Mickael Bobby Hoelman et al. *Buku Panduan SDGs bagi Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah* (Jakarta: Infid, 2015), h. 15 dikutip Sugeng Bahagijo, “Janji Sustainable Development Goals: Kebebasan, Kesenjangan, dan Ekologi” dalam *Jurnal Prisma* Vol. 35, No. 2, 2016, h. 46.

8 tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan.	Berisi 17 tujuan berupaya merombak struktur dan sistem; • Kesetaraan gender • Tata pemerintahan • Perubahan model konsumsi dan produksi • Perubahan sistem perpajakan • Diakuinya masalah ketimpangan • Diakuinya masalah perkotaan
---	--

Mengikuti para filsuf lain, Sonny Keraf menunjukkan bila kita menggunakan paradigma pembangunan berkelanjutan ternyata dimungkinkan menemukan jalan buntu. Hal itu dikarenakan paradigma pembangunan berkelanjutan dinilai merupakan hasil kompromi politik dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, tetapi dalam perjuangannya cenderung tidak sadar bahwa dengan menerima paradigma tersebut, kita semua kembali menegaskan bahwa yang utama ialah pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonominya. Oleh karenanya tidak heran, selama dua dasawarsa berselang tetap saja pembangunan ekonomi dan pertumbuhannya lebih diutamakan, sedangkan aspek sosial budaya dan lingkungan hidup ditinggalkan serta diabaikan begitu saja. Dengan kata lain, Wolfgang Sachs memetakan paradigma pembangunan berkelanjutan lebih memfokuskan diri bukan perihal ekologi, melainkan ekonomi.¹⁶

Dengan mengintegrasikan pemikiran para filsuf ekologi, Sonny Keraf menunjukkan empat kelemahan paradigma pembangunan berkelanjutan di antaranya¹⁷; *Pertama*. Tidak ada sebuah titik kurun yang jelas dan terukur yang menjadi sasaran pembangunan berkelanjutan. Artinya, pembangunan ini hanya merupakan sebuah komitmen yang sulit diukur kapan tercapainya. Hal tersebut dikarenakan belum ada agenda waktu yang jelas dan tegas. Menanggapi kelemahan ini,

¹⁶ Wolfgang Sachs, "Global Ecology and the Shadow of Development" dalam George Sessions (ed.). *Deep Ecology for the 21st Century: Reading on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism* (Boston: Shambhala, 1995), h. 428. dikutip A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Kompas, 2010), h. 209.

¹⁷ Lihat A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*, h. 209-210.

penulis merasa Indonesia sudah mulai mencanangkan tujuan dan waktu program yang lumayan jelas dalam mengemban paradigma pembangunan berkelanjutan, walaupun hal itu harus senantiasa dikawal hingga selesai. *Kedua*. Asumsi paradigma pembangunan berkelanjutan didasarkan pada cara pandang yang sangat antroposentris. Dengan kata lain, alam hanya dipandang sebatas alat bagi pemenuhan kebutuhan material manusia sehingga alam kerap dilihat seolah kurang memiliki ruang bagi dirinya sendiri. *Ketiga*. Asumsi bahwa manusia bisa menentukan daya dukung ekosistem lokal dan regional. Artinya, manusia seolah lupa bahwa alam memiliki kekayaan dan kompleksitas yang sulit diprediksi manusia. Oleh karenanya, manusia baru disadarkan bila bencana alam sudah datang menyerang mereka. *Keempat*. Paradigma pembangunan berkelanjutan diduga bertumpu pada ideologi materialisme. Donald Woorster menunjukkannya melalui ajakan semua negara untuk dianjurkan mengikuti jalan yang selama ini ditempuh oleh berbagai negara-negara maju yang menganut materialisme.¹⁸

Berpijak pada pertimbangan dan kelemahan di atas, Arne Naess menawarkan paradigma “keberlanjutan ekologi” sebagai ganti pembangunan berkelanjutan. Bagi Naess, keberlanjutan ekologi barulah dicapai apabila adanya perubahan mendasar terkait kebijakan politik ekonomi yang menyangkut pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup masyarakat konsumtif.¹⁹ Bahkan, pola ini seyogyanya harus dimulai dari aras global hingga lokal, atau sebaliknya lokal menginspirasi global guna melakukan perubahan. Keberlanjutan ekologi tidak mendasarkan diri pada pembangunan itu sendiri, melainkan mempertahankan dan melestarikan ekologi dengan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, penulis merasa kita masih boleh menggunakan istilah “pembangunan berkelanjutan” asalkan orientasi pembangunan bukan ekonomi semata, melainkan proporsional antara kehidupan ekologis, sosial-budaya, dan ekonomi.

Penyintasan Pemikiran Ekofeminisme: Dari Akar Pemikiran hingga Kritik terhadapnya

¹⁸ Donald Woorster, “The Shaky Ground of Sustainability” dalam George Sessions (ed.). *Deep Ecology for the 21st Century*, h. 419, 424-425. Dikutip A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*, h. 210.

¹⁹ Arne Naess, “The Third World, Wilderness and Deep Ecology” dalam George Sessions (ed.). *Deep Ecology for the 21st Century*, h. 419, 424-425. Dikutip A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*, h. 402.

Setelah kita memahami uraian di atas serta penegasan paradigma pembangunan berkelanjutan, pertanyaan berikutnya ialah “Bagaimana kelompok ekofeminisme memahaminya?”. Rosemarie Putnam Tong menunjukkan ekofeminisme muncul pertama kali pada tahun 1974 dalam buku Francoise d'Eaubonne yang berjudul “Le Feminisme ou la mort”. Karya tersebut menjelaskan pandangan bahwa ada hubungan langsung antara opresi terhadap perempuan dan alam. Dengan kata lain, pembebasan dimaksudkan sebagai salah satu dari keduanya tidak dapat terjadi secara terpisah dari yang lain. Oleh karenanya, Karen J. Warren memetakannya dalam empat hal yaitu²⁰; (1) Ada keterkaitan penting antara opresi terhadap perempuan dan alam; (2) Pemahaman terhadap alam dalam keterkaitan ini menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman yang memadai atas opresi terhadap perempuan dan alam; (3) Teori dan praktik feminis harus memasukkan perspektif ekologi; dan (4) Pemecahan masalah ekologi harus menyertakan perspektif feminis.

Ekofeminisme menawarkan alternatif bahwa persoalan ekologi tidak hanya berbicara mengenai dominasi manusia terhadap alam (antropomorfisme), melainkan keterpusatan pada laki-laki (androsentrisme). Ariel Kay Salleh menunjukkan pembangunan ekologi kerap hanya diwakili laki-laki saja sehingga terkesan ada ketakutan mengkonfrontasikan seksisme dan naturisme sebagai penyebab krisis lingkungan hidup yang dialami.²¹ Oleh karenanya, para ekofeminis meyakini kebencian masyarakat terhadap perempuan turut berimplikasi pada alam. Masalahnya, apakah pemikiran ini bisa langsung ditarik hubungan? Ternyata dalam kubu ekofeminisme sendiri, kita bisa menemukan dua pemikiran yakni, satu sisi ekofeminisme bisa menunjukkan argumentasi yang mendukung hubungan perempuan dan alam, dan sebaliknya ada pemisahan, serta usaha menghilangkan hubungan antara perempuan dan alam karenanya keduanya berbeda wilayah. Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat diperhatikan pada bagian berikutnya.

²⁰ Karen J. Warren, “Feminism and Ecology” dalam *Environmental Review* 9. No. 1, 1987), h. 3-20 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought* terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), h. 366.

²¹ Ariel Kay Salleh, “Deeper than Deep Ecology: The Ecofeminist Connection” dalam *Environmental Ethics* 6, no. 1, 1984, h. 339. dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 367.

1. Argumentasi Ekofeminisme yang Mendukung Pemisahan Hubungan Perempuan dan Alam

Argumentasi bagian ini kerap diwakili oleh Val Plumwood dan Sherry B. Ortner. Simone de Beauvoir mendorong perempuan untuk mentransendensikan hubungan mereka dengan alam guna melampaui status mereka sebagai Liyan atau jenis kelamin kelas kedua. Dengan kata lain, ia menunjukkan bahwa identitas perempuan disebabkan oleh fakta biologis dan tanggung jawab sosialnya atas pengasuhan anak. Beauvoir hendak menawarkan terobosan bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya telah terperangkap dalam dialektika Ada untuk dirinya sendiri (*pour-soi*) dan Ada dalam dirinya sendiri (*en-soi*).²² Ada untuk dirinya sendiri membuat kita menjadi pribadi yang sadar terhadap adanya kemungkinan bagi penciptaan diri yang ditawarkan oleh masa depan, sedangkan Ada dalam dirinya sendiri telah mengonstruksi Ada sebagai Liyan yang belum memiliki masa depan tanpa kemungkinan untuk mentransformasikan apapun. Beauvoir menegaskan bila perempuan ingin dibebaskan dari status jenis kelamin kedua, maka mereka harus sedia menahan godaan untuk tidak mengambil jalan keluar yang mudah atau singkat, termasuk dengan menolak menjadi Liyan. Bagi **Plumwood**, upaya penolakan Ada dalam diri sendiri bisa membuat perempuan tidak akan memperoleh kemanusiaan yang sejati, melainkan memperoleh kesempatan guna menjadi partner penuh antara laki-laki dan perempuan yang tidak akan dijembatani atau tersembuhkan secara menyeluruh. Oleh karenanya, perempuan harus berani meyakini Ada secara eksistensial. Dalam rangka relasinya dengan alam, Plumwood kurang sependapat dengan acuan Beauvoir. Hal ini dinyatakan melalui;

Bagi Simone de Beauvoir, perempuan akan menjadi manusia penuh seperti laki-laki, dengan bergabung bersama laki-laki dalam mengambil jarak dari dan dalam mentransendensi serta mengendalikan alam. Dengan kata lain, ia telah mempertentangkan transendensi laki-laki dan penaklukan terhadap alam dengan imanensi perempuan yang diidentifikasi dengan dan secara pasif larut dalam alam dan tubuhnya. “kemanusiaan yang penuh” akan diraih oleh perempuan mengandung maksud menjadi bagian superior jiwa, mendominasi dan mentransendensi alam dan ketubuhan, kebebasan, dan keterkendalian yang dipertentangkan dengan keterlarutan dalam alam dan ketidakterkendalian yang buta. Perempuan menjadi “manusia secara penuh” dengan cara

²² Lihat Simone de Beauvoir. *The Second Sex*. (New York: Vintage Books, 1952), h. 19-29 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 368.

terserap dalam wilayah kebebasan dan transendensi maskulin yang dikonseptualisasikan dalam istilah-istilah chauvinis manusia.²³

Melalui argumentasi di atas, Plumwood menyatakan bahwa dikotomi laki-laki dan perempuan sebenarnya justru tidak akan terjembatani atau tersembuhkan bagi menjadi kemenyeluruhan, melainkan malah menjadi semakin mudah terhapuskan dan luruh dalam anggota laki-laki. Bagaimana tidak, perempuan dimungkinkan semakin meninggalkan alam sehingga alampun menjadi rusak karena ketamakan manusia. Oleh karenanya, Plumwood mengajak para perempuan menjadi semakin kritis atas keberadaan dirinya. Melihat kondisi demikian, **Sherry B. Ortner** meyakini adanya kesulitan bagi perempuan untuk memutuskan kedekatannya dengan alam. Hal ini disebabkan munculnya label bahwa perempuan cenderung lebih dekat dengan alam, ketimbang laki-laki. Secara detail, Ortner menggambarannya melalui tiga alasan, di antaranya²⁴; *Pertama*. Fisiologi perempuan lebih terlibat dalam waktu yang lebih lama dengan spesies kehidupan. *Kedua*. Tempat perempuan berada dalam ranah domestik, yakni tempat bayi-bayi serupa binatang telah perlahan ditransformasi menjadi makhluk kultural, serta tempat produk tumbuhan dan binatang diubah menjadi pangan, sandang, dan papan. *Ketiga*. *Psike* perempuan yang dibentuk sesuai dengan fungsi ibu melalui sosialisasi dirinya sendiri sehingga cenderung condong pada cara berpikir yang lebih relasional, konkrit, dan khusus.

Alasan di atas secara tidak langsung menimbulkan implikasi perbedaan penafsiran atas istilah “pertengahan” dalam konteks perempuan dipandang berada di antara alam dan kebudayaan. Secara detail, hal ini dinyatakan dalam tiga hal yaitu²⁵; *Pertama*. “Pertengahan” dapat berarti perempuan memiliki status menengah dan bahkan dimungkinkan lebih rendah dari laki-laki, tetapi lebih tinggi dari alam. *Kedua*. “Pertengahan” dapat juga bermakna perempuan menengahi atau melakukan serangkaian

²³ Val Plumwood, “Ecofeminism: An Overview and Discussion of Positions and Arguments” dalam *Australian Journal of Philosophy* 64, Juni 1986, h. 135 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 370.

²⁴ Lihat Sherry B. Ortner, “Is Female to Male as Nature is to Culture?” dalam MacKinnon and McIntyre (eds.). *Reading in Ecology and Feminist Theory*, h. 40-41. dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 371.

²⁵ Lihat Sherry B. Ortner, “Is Female to Male as Nature is to Culture?”, h. 52-53 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 371.

fungsi sintesis atau konversi antara alam dan kebudayaan. Dengan kata lain, Ortner sebenarnya hendak menunjukkan adanya hipotesis bahwa kebudayaan dimungkinkan memiliki kepentingan atas pilihan seksual, reproduktif, dan pendidikan, dan pekerjaan para perempuan. *Ketiga*. “Pertengahan” bisa berarti sebagai sebuah ambiguitas simbolik yang lebih besar. Hal ini dikarenakan kebudayaan tidak akan pernah mengerti sungguh-sungguh keberadaan perempuan, termasuk hubungan perempuan dengan semua paradoks kehidupan dan kematian, kebaikan atau kejahatan, tatanan atau kekacauan. Tiga penafsiran tersebut dimaksudkan Ortner bahwa tidak mungkin mengubah aktualitas sosial perempuan, kecuali hanya dengan munculnya pandangan kebudayaan sebagai penengah antara dirinya dan alam juga berubah. Dalam kondisi demikian, perempuan terkesan memiliki dua sisi, yakni sisi aktualitas sosial dan ideologis atau konseptual. Sisi aktualitas berkenaan dengan fisiologi, peran domestik, dan *psike* feminin perempuan yang khusus, sedangkan sisi ideologis berhubungan dengan kondisi perempuan yang menempati status menengah sebagai pelaksana fungsi penengah antara alam dan kebudayaan, serta pembawa muatan simbolik yang ambigu. Guna menunjukkan posisi Ortner secara detail, ia berpendapat berikut;

Usaha-usaha yang secara langsung diarahkan pada perubahan lembaga sosial melalui penentuan kuota dalam pekerjaan, misalnya melalui usaha menerima undang-undang upah yang setara bagi pekerjaan. Hal ini tentu dimaksudkan tidak dapat menghasilkan efek yang jauh ke depan apabila bahasa dan imajeri kebudayaan terus menerus menyediakan pandangan yang secara relatif merendahkan nilai perempuan. Namun pada saat yang sama, usaha yang diarahkan pada perubahan asumsi kebudayaan melalui kelompok-kelompok penumbuhan kesadaran tidak dapat berhasil kecuali jika dasar-dasar kelembagaan di dalam masyarakat juga diubah untuk mendukung dan memaksakan pandangan kebudayaan yang sudah diubah itu.²⁶

Melalui argumentasi di atas, Ortner menegaskan bahwa perempuan dimungkinkan dapat dibebaskan tanpa harus membebaskan alam. Artinya, Ortner berharap adanya perubahan atas aktualitas sosial laki-laki dan ideologi yang mengikutinya, sebagaimana upaya mengubah aktualitas perempuan. Tentunya, hal tersebut sangat sulit. Hal ini dikarenakan implikasi bila hendak menjembatani jarak perempuan dari kebudayaan dengan melibatkan perempuan di

²⁶ Lihat Sherry B. Ortner, “Is Female to Male as Nature is to Culture?”, h. 54. dikutip Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, h. 372.

dalam tugas-tugasnya, maka turut dibangun jembatan jarak laki-laki dari alam dengan melibatkan laki-laki dalam tugas yang berulang-ulang.

2. Argumentasi Ekofeminisme yang Menekankan Hubungan Perempuan dan Alam

Sebagai pengantar masuk pada bagian ini, kita perlu memahami perbedaan paradigma mendasar ekofeminisme. Ekofeminisme radikal-kultural cenderung berusaha memperkuat hubungan perempuan dengan alam, sedangkan ekofeminisme alam meyakini bahwa sifat-sifat yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan bukanlah semata hasil konstruksi budaya sebagai produk dari pengalaman aktual biologis dan psikologis perempuan.²⁷ Masalahnya, hubungan demikian kerap dipandang rendah. Oleh karenanya, ekofeminisme alam cenderung menolak inferioritas yang diletakkan pada perempuan dan alam melalui argumentasi bahwa alam dan perempuan diupayakan setara dengan, bahkan lebih baik dari kebudayaan laki-laki. Kalau demikian, berbagai pemikiran bagian ini dapat dikategorikan sebagai kelompok ekofeminisme jenis mana?

Para filsuf ekofeminisme yang cenderung menekankan hubungan perempuan dan alam di antaranya Mary Daly dan Susan Griffin. Selain mereka, Starhawk dan Charles Spretnak turut melihat hubungan perempuan dan alam dari sisi ekofeminisme spiritual. **Daly** cenderung menolak kebudayaan laki-laki yang dianggap jahat, lalu merangkul kebudayaan yang dianggap baik. Hal ini didasarkan karena keyakinannya untuk mengembalikan perempuan dalam kondisi matriarki. Matriarki merupakan keadaan di mana perempuan memiliki kesempatan mengendalikan hidup mereka sendiri, terikat satu sama lain, dan juga dengan dunia bukan manusia yang terdiri atas binatang dan alam.²⁸ Daly melakukannya dengan mencoba mengontraskan kekuatan perempuan yang memberikan kehidupan dengan kekuatan laki-laki berkenaan kematiannya. Dalam hal ini, perempuan diklaim memiliki kapasitas untuk kehidupan manusia yang sepenuhnya. Kehidupan tersebut memiliki makna yang penuh kekuatan dan energi yang dijalani dalam persekutuan dinamis dengan binatang, bumi, dan bintang, atau benda alam lainnya. Bahkan secara ekstrim, Daly berpendapat

²⁷ Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 373.

²⁸ Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 374.

bahwa laki-laki dianggap sebagai parasit yang menghabiskan energi perempuan bagi pembiayaan kegiatan mereka yang destruktif dan pemikiran yang membatasi.²⁹ Hal ini dikarenakan laki-laki tidak mampu menghadirkan hidup di dunia dan mereka tidak mampu menjalin hubungan dengan alam. Secara detail, hal ini dituangkannya melalui argumentasi berikut;

Produk perkawinan laki-laki Apollonian yang nekrofilis dipandang sebagai keturunan teknologis yang mencemarkan surga dan bumi. Hal ini dikarenakan hasrat para nekrofilia merupakan kehancuran kehidupan, dan karena ketertarikan mereka pada segala sesuatu yang mati, sekarat, dan murni mekanis, “fetus” yang diberhalakan para ayah yang kerap diidentifikasi dengan penuh gairah sebagai diri mereka sendiri. Reaktor nuklir dan racun yang dihasilkan laki-laki, setumpuk bom atom, propelan spray aerosol yang merusak ozon, tanker minyak yang didesain guna menghancurkan diri dalam lautan, pengobatan iatrogenik dan tambahan makanan yang karsinogenik, gula murni, dan segala bentuk pencemar pikiran. Pendek kata, hal ini dipandang sangat berlipat-lipat dari seluruh persetubuhan busuk laki-laki yang jatuh cinta pada dunia mati dan secara mutlak setara dan sama substansialnya dengan dirinya sendiri. Tahi Exxon ada di mana-mana dan turut mengancam di mana-mana.³⁰

Argumentasi di atas menjelaskan hubungan pencemaran yang dilakukan laki-laki terhadap alam dengan pencemaran terhadap perempuan melalui upaya mengontranskannya dengan ginekologi. Ginekologi laki-laki merupakan ginekologi yang menggantikan sesuatu yang asli dengan kepalsuan dan alami diganti dengan buatan. Sebaliknya, gin atau ekologi berbicara tentang perempuan yang hidup, menyayangi, dan menciptakan diri.³¹ Dengan kata lain, ginekologi laki-laki bergantung pada “fiksasi dan pemotongan”, sedangkan gin/ekologi perempuan menegaskan bahwa segala sesuatu saling berhubungan. Oleh karenanya, perempuan harus bekerja keras untuk menghentikan kekuatan nekrofilia yang patriakal yaitu kekuatan kematian. Sementara pada masa matriarki, perempuan bereproduksi dengan cara partenogenesis. Partenogenesis menunjukkan telur mereka membagi dan berkembang tanpa membutuhkan sperma. Namun pada patriarki, laki-laki telah berhasil membujuk perempuan untuk menukarkan reproduksi ilmiah dengan artifisial. Daly mendorong perempuan

²⁹ Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 374.

³⁰ Mary Daly. *Gyn/ Ecology*. (Boston: Beacon Press, 1978), h. 63-64 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 374-375.

³¹ Mary Daly. *Gyn/ Ecology*. (Boston: Beacon Press, 1978), h. 63-64 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 375.

mewujudkan kekuatan. Hal ini dilakukan dengan upaya membebaskan diri mereka dari laki-laki bagi kepentingannya sendiri. Namun sebaliknya, apabila perempuan tidak berhasil menyelesaikan tugas ini, maka alam bisa dimungkinkan berakhir.

Susan Griffin meyakini dirinya bukanlah seorang esensialis, tetapi ia percaya pada keterkaitan antara perempuan dan alam. Hal ini dinyatakan melalui pernyataannya, “Kita mengetahui diri kita terbuat dari tanah. Kita mengetahui bahwa tanah ini dibuat dari tubuh kita karena kita melihat diri kita sendiri dan kita merupakan alam.”³² Pendek kata bagi Griffin, kita merupakan alam yang melihat alam. Oleh karenanya, perempuan memiliki cara khusus untuk mengetahui dan melihat realitas. Semua dilakukan guna membantu manusia keluar dari dunia dualistik yang semu dan destruktif. Secara detail, Griffin menjelaskannya berikut;

Ia mengatakan bahwa perempuan berbicara dengan alam. Ia mendengar suara dari dalam bumi. Angin bertiup di telinganya dan pepohonan berbisik kepadanya. Orang yang mati menyanyi melalui mulutnya, dan tangisan bayi menjadi jelas baginya. Tetapi bagi laki-laki, dialog ini telah berakhir. Ia mengingatkan bahwa laki-laki bukanlah bagian dari dunia ini karena ia ditempatkan di dunia ini sebagai orang asing. Sebab, ia menempatkan dirinya telah terpisah dari perempuan dan alam.³³

Griffin memang berusaha mengatasi dualisme dengan menyampaikan antidot terhadap hirarki epistemologi Plato. Plato terkesan membawa laki-laki Barat keluar dari apa yang dianggap sebagai ranah inderawi inferior, dunia penampilan, ke dalam apa yang dianggapnya sebagai ranah intelektual superior, dunia bentuk. Hal ini dilakukannya karena pada ranah intelektual superior inilah, gagasan kecantikan, kebenaran, dan kebaikan seharusnya berada. Namun bagi Griffin, Plato telah membawa jalan yang salah dengan cara bersikeras bahwa jiwa merupakan superior terhadap tubuh dan mendorong kita untuk memandang laki-laki sebagai pikiran dan perempuan sebagai tubuh.³⁴ Dengan kata lain,

³² Susan Griffin. *Woman and Nature: The Roaring Inside Her*. (New York: Harper & Row, 1978), h. 226 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 376.

³³ Susan Griffin. *Woman and Nature: The Roaring Inside Her*. (New York: Harper & Row, 1978), h. 226 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 377.

³⁴ Susan Griffin. *Woman and Nature: The Roaring Inside Her*. (New York: Harper & Row, 1978), h. 83-84 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 377.

Griffin menekankan hirarki dualistik Plato berada di balik pandangan masyarakat Barat bahwa perempuan merupakan inferior terhadap laki-laki.

Apabila laki-laki dilihat di atas perempuan bisa dikatakan sebagai keputusan yang salah. Hal ini dikarenakan segala sesuatu dapat direduksi menjadi jumlah, statistik, rasio biaya untung. Griffin mendorong perempuan untuk melepaskan diri dari kebudayaan dualistik dan kembali ke alam dengan gagasan tempat jiwa dan tubuh menyatu, habitat sesungguhnya dari manusia yang lebih sekedar dari gagasan. Alam memiliki nilai yang tidak dapat direduksi ke dalam kegunaannya bagi kebudayaan, dan perempuan mempunyai nilai yang tidak dapat direduksi ke dalam kegunaannya bagi laki-laki. Hal ini dikarenakan Griffin melihat kembali dikotomi alam dan kebudayaan. Dikotomi ini telah menggambarkan pornografi sebagai balas dendam kebudayaan terhadap alam, dan juga balas dendam laki-laki terhadap perempuan. Dengan kata lain, perempuan harus menolak membiarkan dirinya dan alam dieksploitasi dengan cara demikian.

Dari sisi ekofeminisme spiritual, Starhawk dan Charles Spretnak turut membangun hubungan alam dan perempuan. Ekofeminisme spiritual berpendapat bahwa hubungan yang dekat antara degradasi lingkungan dan keyakinan Yahudi-Kristen ialah Tuhan memberikan sebuah kekuasaan kepada manusia atas bumi. Meskipun ekofeminisme spiritual mencoba menarik kekuatan dari beragam spiritualitas berbasis bumi, mereka sebenarnya cenderung memfokuskan diri pada penyembahan dewa-dewi kuno dan ritual penduduk asli yang berorientasi pada bumi. Mereka meyakini bahwa kebudayaan yang memandang tubuh perempuan dinilai sakral. Tak hanya itu, alampun dinilai sakral karena adanya penghormatan atas perputaran dan ritmenya. Ekofeminisme spiritual kerap dipandang berpijak pada analogi antara peran perempuan dalam produksi biologis dan peran arketipikal “Ibu Pertiwi” atau “Ibu Kelahiran” (biasa diacu sebagai Gaia) dipandang pemberi kehidupan dan pencipta segala sesuatu yang ada. Hal ini dikarenakan peran perempuan bersifat analog dengan peran Gaia.³⁵

³⁵ Riane Eisler, “The Gaia Tradition and the Partnership Future: An Ecofeminist Manifesto” dalam Irene Diamond dan Gloria Feman Orenstein (eds.). *Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism* (San Francisco: Sierra Club Books, 1990), h. 23 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 381.

Starhawk mengawali pemikirannya dengan menunjukkan pengalaman tubuh perempuan yang unik mengindikasikan hubungan manusia yang bersatu dengan alam. Pengalaman tubuh perempuan tentu berkenaan dengan menstruasi bulanannya, simbiosis kehamilan yang menuntut perhatian, kesakitan ketika melahirkan, dan kenikmatan menyusui anak-anaknya. Oleh karenanya, Starhawk memetakan spiritualitas yang berbasis bumi berkenaan dengan tiga karakteristik yaitu imanensi, saling keterhubungan (*interconnectedness*), dan gaya hidup yang peduli. Imanensi menekankan bahwa spiritualitas bukanlah candu. Spiritualitas merupakan pembangkit energi dan pemicu tindakan. Bagi Starhawk, ketika apa yang sedang terjadi merupakan peracunan dan penghancuran bumi, pengembangan pribadi kita juga menuntut untuk menyadari semua itu dan melakukan segala sesuatu untuk menghentikannya bagi membelokkan gelombang dan menyembuhkan planet.³⁶

Saling keterhubungan menunjukkan bukan hanya tubuh kita saja yang alamiah, melainkan nalar kita. Hal ini dikarenakan kapasitas manusia kita terdiri atas loyalitas dan cinta, kemarahan dan humor, nafsu, intuisi, intelek, dan simpati merupakan bagian dari alam sebagaimana juga kadal dan hutan kayu merah. Starhawk menunjukkan semakin kita memahami kesatuan dengan alam, maka kita turut memahami kesatuan dengan yang ada, di antaranya manusia, siklus dan proses alam, binatang, dan tumbuhan. Oleh karenanya, kita dimungkinkan membuat kesalahan apabila kita telah menyekutukan diri dengan manusia untuk melawan alam, atau sebaliknya menyekutukan diri dengan alam guna melawan manusia. Kemudian, gagasan gaya hidup yang peduli bisa dikatakan sebagai gaya hidup perempuan. Hal itu dikarenakan apabila kita tidak peduli satu sama lain, kita dapat melupakan segala sesuatu tentang merajut ulang dunia atau menyembuhkan luka. Semua dilakukan apabila dikotomi alam dan kebudayaan telah dilarutkan dengan menghargai kesatuan atas kenyataan.

³⁶ Starhawk, "A Story of Beginnings" dalam Plant (ed.). *Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism*, h. 176 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 382.

3. Argumentasi Ekofeminisme yang Mendukung Penghilangan Penekanan Hubungan Perempuan dan Alam

Argumentasi ekofeminisme yang mendukung penghilangan penekanan hubungan perempuan dan alam kerap diwakili oleh Dorothy Dinnerstein, Karen J. Warren, Maria Mies, dan Vandana Shiva. Bagi **Dorothy Dinnerstein**, pemikiran dikotomi barat harus dihancurkan guna mengakhiri opresi terhadap setiap orang dan segala sesuatu yang selama ini tidak dihargai. Penghancuran ini perlu dimulai dengan mendekonstruksi dikotomi perempuan dan laki-laki. Sebab, dikotomi merupakan sumber fundamental dari kebencian yang sunyi dari Ibu Pertiwi yang hidup berdampingan dengan kecintaan kita kepadanya, dan yang seperti kebencian yang kita rasakan bagi Ibu manusia kita, meracuni kedekatan kita terhadap kehidupan. Dinnerstein menegaskan usaha meminggirkan perempuan dan alam dari laki-laki dan kebudayaan telah menyebabkan kita bukan saja untuk mencederai dan mengeksploitasi perempuan, serta membatasi dan mendeformasi laki-laki, tetapi untuk terus berjalan menuju pembunuhan yang penuh amarah dan ketamakan terhadap bumi yang melahirkan kita.³⁷ Hal ini dikarenakan sebagian besar manusia percaya dengan mitos “mega mesin”. Mitos ini menuntut adanya pandangan bahwa manusia dapat mempergunakan nalarnya dan perkakasnyanya, tidak saja untuk memperluas kekuasaannya atas alam dan segala sesuatu yang diidentifikasi sebagai perempuan, tetapi juga guna memperoleh keuntungan moneter yang besar kala melakukannya. Bagaimana tidak, mitos ini dimungkinkan terus mengatur pikiran dan tindakan. Oleh karenanya, perempuan harus membawa alam ke dalam kebudayaan, dan laki-laki harus membawa kebudayaan ke dalam alam.

Sebagaimana Dinnerstein, **Karen J. Warren** menekankan dualisme mengancam yang dimungkinkan menghancurkan kita yaitu konstruksi sosial. Warren mengklaim seorang feminis haruslah seorang ekofeminis. Hal ini dikarenakan feminisme merupakan gerakan melawan naturisme dan pada saat yang sama melawan seksisme. Secara detail, hal itu digambarkan pola berikut;

³⁷ Dorothy Dinnerstein, “Survival on Earth: The Meaning of Feminism” dalam Plant (ed.). *Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism*, h. 176 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 385.

- (C1) Feminisme merupakan gerakan guna mengakhiri seksisme.
- (C2) Tetapi seksisme secara konseptual berhubungan dengan naturisme (melalui bingkai kerja konseptual yang opresif, yang dikarakterisasi oleh logika dominasi).
- (C3) Karena itu, feminisme merupakan juga gerakan bagi mengakhiri naturisme.³⁸

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk opresi telah saling mengunci dan terkait. Dalam hal ini, opresi berkenaan dengan binatang berkepala banyak yang akan terus ada, dan meregenerasi dirinya hingga manusia secara total memutus kepalanya. Opresi tersebut kerap dilandaskan pada *co-ethics*. Menurut Warren, *co-ethics* memiliki elemen seksis atau bias laki-laki yang merendahkan kemampuannya guna menyelamatkan planet bumi. Oleh karenanya, kita perlu menyandingkannya dengan etika ekofeminisme. Etika ini mengindikasikan delapan hal yaitu;

[1] Antinaturis. Nilai ini menolak setiap cara berpikir atau bertindak terhadap alam bukan manusia yang merefleksikan logika, nilai, atau sikap dominasi. [2] Kontekstualis. Nilai ini lebih menekankan pada hubungan manusia dengan alam, bukan sesama manusia. [3] Pluralistik dalam strukturnya. Nilai ini tentu mengakui perbedaan antar manusia sebagaimana juga mengakui perbedaan antara manusia dan bukan sesamanya. [4] Secara teoritis selalu “dalam proses”, artinya etika ini lebih mengutamakan penggunaan naratif orang pertama dan kalimat aktif daripada analisis orang ketiga dan kalimat pasif. [5] Inklusivitas. [6] Mempunyai “bias” subyektif yang mengidentifikasi kerangka kerja konseptual patriarkhal, misalnya pemecahan perempuan laki-laki dan alam kebudayaan sebagai penyebab fundamental dari naturisme dan seksisme yang keduanya bisa dibilang salah. [7] Atentif dan apresiatif terhadap nilai-nilai tradisional “feminin”. [8] Tertarik pada pemikiran kembali manusia sebagai makhluk yang bergantung pada lingkungan, dan yang “esensi”nya tidak lebih kurang material dan “alami” daripada manusia sebagai makhluk bersifat spiritual dan bersifat duniawi lain.³⁹

Warren mengklaim ekofeminis dapat berhubungan dengan bukan manusia melalui cara yang dapat mengatasi pemecahan alam kebudayaan, tanpa mengabaikan perbedaan mereka dari bukan manusia. Hal ini digambarkan ketika kelompok ekofeminis berupaya memanjat

³⁸ Warren, “Feminism and Ecology: Making Connections”, h. 109-111. dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 387.

³⁹ Warren, “The Power and the Promise of Ecological Feminism”, h. 186-187. dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 388.

gunung maka ia diandaikan memiliki hubungan yang sesungguhnya dengan gunung tersebut. Hal itu dikarenakan seorang ekofeminis tidak dimaksudkan melihat gunung dengan “mata yang arogan”, melainkan memandangnya sebagai laki-laki tampan yang merupakan material tak berdaya dengan mencoba memperoleh hal yang terbaik.

Dalam pengembangannya, Warren menunjukkan ekofeminis sosialis bisa dikatakan paling dekat memberikan dasar teoritis guna melaksanakan praktik ekofeminis. Hal ini dikarenakan gagasan ekofeminis sosialis cenderung anti-dualis. Namun, ekofeminis sosialis tidak bermaksud menghapuskan dikotomi manusia dan bukan manusia karena feminis sosialis gagal melihat bagaimana opresi terhadap perempuan oleh laki-laki berhubungan dengan opresi terhadap bukan manusia oleh manusia. Dengan gagasan ini, Warren menghimbau “feminisme” dimungkinkan menjadi lebih komprehensif melalui istilah “feminisme transformatif”.⁴⁰ Feminisme transformatif setidaknya dinyatakan dalam enam karakteristik yaitu⁴¹; *Pertama*. Feminisme transformatif mengakui dan mengeksplisitkan saling keterkaitan antara semua sistem opresi. *Kedua*. Feminisme transformatif menekankan keberagaman pengalaman perempuan dan menghindari pencarian “perempuan” dan pengalaman bersamanya. *Ketiga*. Feminisme transformatif menolak logika dominasi. *Keempat*. Feminisme transformatif memikirkan ulang apa artinya menjadi manusia, dan dengan penuh keberanian mempertimbangkan kembali apakah manusia harus memandang “kesadaran” dan rasionalitas, tidak saja sebagai pembeda manusia dari bukan manusia, tetapi juga menjadikan manusia lebih baik daripada bukan manusia. *Kelima*. Feminisme transformatif bergantung pada etika yang menekankan nilai-nilai “feminin” tradisional yang cenderung untuk menjalin, saling menghubungkan, dan menyatukan manusia. *Keenam*. Feminisme transformatif berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hanya digunakan untuk menjaga kelangsungan bumi.

⁴⁰ Warren, “The Power and the Promise of Ecological Feminism”, h. 118 dikutip dari Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, h. 391.

⁴¹ Lihat Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, h. 391.

Maria Mies bisa dikatakan sebagai filsuf ekofeminis yang berupaya menjembatani jurang antara ekofeminisme sosialis dan transformatif. Mies turut dikenal sebagai sosiolog dengan karyanya dalam ekonomi pembangunan. Sedangkan, **Vandana Shiva** merupakan seorang ahli fisika yang dikenal karena ketertarikannya pada spiritualitas. Mies dan Shiva menekankan bahwa perempuan lebih terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan untuk mempertahankan hidup dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan lebih menaruh perhatian pada elemen udara, air, bumi, dan api ketimbang laki-laki. Oleh karenanya, Mies menunjukkan seks merupakan harapan terakhir laki-laki kulit putih untuk dapat berhubungan dengan alam. Sebab, tidak ada yang lain secara lebih mendalam dalam kehidupan laki-laki. Umumnya, orang-orang dalam patriarki kapitalis tidak memiliki banyak kontak fisik langsung dengan lingkungan. Hubungan mereka dengan alam biasa dimediasi oleh mesin sehingga membuat teralienasi dengan alam. Bagi mereka, seks bisa dikatakan sebagai jalan kontak fisik langsung satu-satunya guna berhubungan dengan alam. Hal ini diuraikan dengan detail sebagai berikut;

Pengobsesian terhadap seks yang tumbuh dengan jelas di masyarakat industri merupakan konsekuensi langsung alienasi dari alam dan ketidakhadiran interaksi sensual dengan alam dalam kehidupan bekerja manusia. Seksualitas dianggap sebagai Liyan yang total dari kehidupan bekerja. Seksualitas merupakan transendensi atas pekerjaan, “surga” setelah lembah air mata dan keringat dari pekerjaan, esensi yang sesungguhnya dari masa senggang. Tragisnya, surga turut merupakan komoditas yang harus dibeli. Dan, seperti akuisisi barang-barang konsumsi lain, pada akhirnya, surga inipun mengecewakan. Karena itu, usaha yang terus menerus mengecewakan guna mencapai surga dinyatakan melalui upayanya mentransformasi kebutuhan menjadi kecanduan.⁴²

Mies dan Shiva terkesan cukup memiliki persamaan dalam memotivasi perempuan agar bekerja sama melawan patriarki kapitalis. Hal ini dinyatakan melalui berbagai narasi yang diungkapkannya berkenaan dengan berbagai contoh perjuangan perempuan dunia ketiga dan pertama melawan kehancuran dan memburuknya ekologi. Bagi mereka, perempuan telah memimpin perjuangan dalam menyelamatkan berbagai dasar-dasar kehidupan di manapun dan kapanpun. Namun, kebebasan yang dituntut perempuan berhubungan dengan upaya

⁴² Maria Mies, “White Man’s Dilemma: His Search for What He Has Destroyed” dalam Maria Mies dan Vandana Shiva. *Ecofeminism* (London: Zed, 1993), h. 132-163 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 394.

meminta semua insan untuk menyadari dan menerima kealamian fisikalitas, materialitas, karnalitas, dan mortalitas.⁴³ Bagi Mies, orang-orang dalam patriarki kapitalis perlu mengambil sepuluh langkah guna mengembangkan gaya hidup subsistensi. Secara detail hal itu tertuang berikut⁴⁴; *Pertama*. Manusia harus menghasilkan hanya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fundamental manusia, dan menolak dorongan untuk menghasilkan “komoditas dan uang dalam kuantitas yang tinggi dan semakin tinggi dalam usaha yang sia-sia untuk menghentikan keinginan manusia yang tidak pernah berakhir, dan tidak akan pernah terpuaskan. *Kedua*. Manusia harus menggunakan alam hanya sebatas kebutuhan mereka, memperlakukannya sebagai suatu realitas dengan subyektivitasnya sendiri dan manusia harus memanfaatkan satu sama lain bukan dengan alasan untuk menghasilkan uang, melainkan untuk menciptakan komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan fundamental manusia.

Ketiga. Manusia harus menggantikan demokrasi representatif dengan demokrasi partisipatoris sehingga setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perhatiannya terhadap orang lain. *Keempat*. Manusia harus mengembangkan pendekatan pemecahan masalah yang multidimensional dan sinergis karena masalah masyarakat kontemporer ialah saling berhubungan. *Kelima*. Manusia harus menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan kontemporer dengan kearifan, tradisi, dan keajaiban atau kekuatan magis kuno. *Keenam*. Manusia harus menghancurkan batas antara kerja dan bermain, ilmu pengetahuan dan seni, jiwa dan benda. *Ketujuh*. Manusia harus memandang air, udara, bumi, dan semua sumber alam sebagai milik komunitas dan bukan perseorangan. *Kedelapan*. Laki-laki dan perempuan harus mengadopsi pandangan ekofeminisme sosialis transformatif melalui subsistensi. *Kesembilan*. Laki-laki dan perempuan harus menumbuhkan nilai-nilai feminine tradisional serta terlibat dalam produksi subsistensi karena hanya masyarakat yang berdasarkan pada perspektif subsistensi dapat hidup dengan damai bersama alam, dan menjunjung tinggi perdamaian antarnegara, generasi dan antara laki-laki dan perempuan. *Kesepuluh*. Dan yang paling penting, manusia

⁴³ Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 395.

⁴⁴ Lihat Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 396-397.

harus menyadari bahwa agar setiap orang berkecukupan, tidak seorang pun harus mendapatkan semuanya.

4. Berbagai Kritik terhadap Pemikiran Ekofeminisme

Pada bagian sebelumnya, kita sudah melihat berbagai pemikiran kelompok ekofeminisme dalam memandang hubungan perempuan dan alam. Kini, kita mulai melihat ternyata berbagai pemikiran tersebut tidak lepas dari kritik. Kritik tersebut ditujukan ke semua cabang ekofeminisme, di antaranya ekofeminisme alam dan atau kebudayaan, ekofeminisme spiritual, ekofeminisme sosial dan sosial-konstruksionis, dan ekofeminisme sosialis dan ekofeminisme transformatif-sosialis. Bagi Janet Biehl, **ekofeminisme alam** telah melakukan kesalahan ketika mereka membiologiskan perempuan dengan asumsi perempuan sebagai makhluk ekologis yang unik yang mampu berhubungan dan memahami alam dengan cara yang laki-laki sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, serta yang peduli dan merawat dengan cara yang sekeras apapun dicoba laki-laki, tidak akan pernah dapat dilakukan laki-laki.⁴⁵ Ekofeminis terlalu bersedia untuk mereduksi perempuan menjadi sekedar tubuh atau untuk membatasi potensi dan kemampuan perempuan terhadap apa yang dianggap berhubungan dengan sifat-sifat peduli sebagai nilai perempuan. Oleh karenanya, Biehl mengkritik Daly atas implikasi perempuan secara acak dan otoritatif mengklaim kembali makna hubungan perempuan dan alam sebagai hubungan yang sungguh positif. Hal ini dikarenakan, hubungan perempuan dan laki-laki dinilai merendahkan perempuan dan beban kebudayaan yang negatif harus ditanggung perempuan yang tidak dapat begitu saja dilepaskan melalui cara mereklaim.

Ekofeminisme spiritual turut menuai kritik dari pemikiran Kiri. Bagi pemikiran Kiri, ekofeminisme spiritual terlalu berfokus pada agama. Hal ini ditandai dengan tindakan menghabiskan terlalu banyak waktu dengan menari di bawah sinar bulan, menyanyikan mantra-mantra, melakukan yoga, bermeditasi dengan “penuh kesadaran” dan saling

⁴⁵ Biehl. *Rethinking Feminist Politics*, h. 14 dikutip Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 398.

mengirimkan pesan.⁴⁶ Mies dan Shiva menilai penyembahan kepada Dewi bukanlah dipandang spiritualitas mewah, melainkan sebuah upaya membongkar dikotomi yang dikonstruksi secara budaya antara spiritualitas dan materialis, serta mengakui segala sesuatu dan semua orang sebagai sosok berharga dan layak dihormati. Selain itu, kita tidak bisa menganggap bahwa mereka tidak ada dikarenakan ekofeminisme spiritual menolak memainkan permainan kekuasaan dengan laki-laki.

Ekofeminisme sosial beranggapan bahwa perempuan secara alami memiliki sifat peduli dan pengasuh, serta sebaliknya karakteristik perempuan merupakan produk enkulturasasi dan sosialisasi. Misalnya, Carolyn Merchant menegaskan bahwa analisis apapun yang menjadikan esensi dan kualitas perempuan secara khusus mengikatkannya kepada takdir biologis, menghambat kemungkinan perempuan untuk meraih kebebasan.⁴⁷ Selain itu, ekofeminisme sosial menganggap kerusakan lingkungan disebabkan oleh kapitalisme yang menghasilkan produksi berlebihan. Dengan kata lain, ekofeminisme sosial mempromosikan strategi kesadaran sosial untuk menghapuskan penindasan perempuan dan kerusakan lingkungan. Bagi para kritikus ekofeminisme sosial, mengabaikan hubungan antara perempuan dan kapasitas pemberi hidup yang dimiliki alam dimungkinkan mengecilkan hasrat ekofeminis ketika merebut kembali alam dalam makna organiknya yang berhubungan dengan biologi perempuan. Katakanlah, jika seorang manusia bernalar memandang mainan dari anak-anak yang sudah mati, sangat mungkin ia akan menyadari ketidakbermaknaan dan juga kekejaman yang dihasilkan oleh perang antarbangsa. Pengandaian tersebut dimaksudkan para ekofeminis ingin mengabaikan bahwa perempuan secara alamiah lebih bersifat pengasuh daripada laki-laki yang mengakui bahwa mereka juga berpikir secara maternal sebagai ibu.

⁴⁶ Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 399.

⁴⁷ Lihat Carolyn Merchant. *Radical Ecology: The Search for a Livable World* (New York: Routledge, 1992), h. 189 dikutip Donny Danardono, "Ekofeminisme: Kontradiksi Kapitalisme dan Etika Kepedulian" dalam Dewi Candraningrum (ed.). *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya* (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), h. 48.

Meskipun kritik menganggap pandangan ekofeminis sosialis sangat kuat, mereka curiga bahwa pandangan ini terlalu banyak menuntut untuk dapat diterima orang kebanyakan. Secara khusus, mereka mengamati bahwa derajat aktivisme dan perubahan gaya hidup yang dituntut dalam ekofeminisme transformatif sosialis merupakan apa yang orang kebanyakan di negara-negara kaya tidak siap, tidak bersedia, atau tidak mampu untuk dilakukan. Misalnya, kebanyakan orang, termasuk kebanyakan feminis, bukanlah vegetarian atau pasifis ataupun pecinta pohon dan kebanyakan dari mereka tidak bersedia untuk mengubah gaya hidupnya secara radikal.⁴⁸ Melihat kritik tersebut, ekofeminis sosialis mengatakan bahwa keengganan orang bertindak perubahan gaya hidup tidak bisa dikatakan sebagai pembenaran moral untuk tidak bertindak. Pendek kata, ekofeminisme sosialis mengakui adanya kemajuan moral yang dipandang berjenjang. Setidaknya, jika seseorang tidak bersedia untuk berhenti memakan daging secara penuh, ia paling tidak dapat menolak untuk memakan daging ternak yang bersal dari “pabrik peternakan” atau ternak yang dipelihara dengan kondisi yang sangat buruk.⁴⁹

Berpijak pada uraian kritik di atas, kita bisa melihat bahwa apapun perbedaan yang timbul antara ekofeminis sosial-konstruksionis dan ekofeminis alam, atau antara ekofeminis sosialis dan spiritual, maka semua kelompok ekofeminis yakin bahwa manusia dikatakan saling berhubungan satu sama lain dan berhubungan dengan dunia, bukan manusia. Masalahnya, pertanyaan yang muncul ialah apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh kebanyakan manusia untuk menyadari betapa tidak rasional dan berperasaannya sistem opresi dan dominasi manusia? Bagaimana tidak, sistem ini ternyata turut membangkitkan kebencian, kemarahan, kerusakan, dan kematian. Kalangan ekofeminisme transformatif senantiasa menantikan kehadiran revolusi, transformasi, dan keajaiban. Apa yang dinantikan tentu membutuhkan kerja keras dalam waktu berkelanjutan.

Implikasi Filosofis Pemikiran Ekofeminisme bagi Pembangunan Berkelanjutan

⁴⁸ Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 401.

⁴⁹ Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*, h. 402.

Pemikiran ekofeminisme bisa dikatakan berspektrum pada kebebasan, kesetaraan, dan ekologi. Hal ini dinyatakan bahwa ekofeminisme merupakan “gerakan sosial” sebagai respon terhadap berbagai krisis ekologi, sekaligus kritik terhadap pendekatan pembangunan yang kurang memperhatikan keberlangsungan ekologis, serta meminggirkan salah satu entitas perempuan di dalamnya. Oleh karenanya, ekofeminisme berupaya mengembangkan dialektika teori dan praktik guna memecahkan persoalan krisis relasi antara manusia dalam relasinya dengan alam. Masalahnya, bagaimana pemikiran tersebut dimungkinkan terimplikasi bagi pembangunan berkelanjutan? Bila kita sejenak menyimak dokumen berjudul “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, maka kita menemukan tujuan dan target SDGs dipilah dalam lima kategori besar, di antaranya rakyat, planet bumi, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan. Kelima kategori ini bisa dikatakan bersifat transformatif. Secara detail, kelima kategori tertuang dalam keenam butir sebagai berikut⁵⁰; [1] **Tujuan Nomor 3** memuat kesehatan untuk semua dengan target menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2030 hingga level 70 per 100 ribu kelahiran di mana kondisi terkini menunjukkan 300/ 100 ribu kelahiran. [2] **Tujuan Nomor 5** memuat mencapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target mengakhiri semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dilakukan melalui upaya menghapus semua bentuk praktik kejahatan, seperti perkawinan paksa, perkawinan anak, dan sunat perempuan. [3] **Tujuan Nomor 6** memuat ketersediaan dan pengelolaan sanitasi dan air bersih bagi semua dengan target pada 2030, terpenuhinya akses atas air minum yang terjangkau dan sanitasi bagi semua. [4] **Tujuan Nomor 10** memuat upaya menurunkan ketimpangan dalam negara dan antar-negara dengan target pada 2030, terjadi kenaikan tingkat pertumbuhan pendapatan 40 persen lapisan penduduk terbawah di atas rata-rata pertumbuhan pendapatan. [5] **Tujuan Nomor 12** membangun kepastian pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan target melaksanakan kerangka kerja 10 tahun menuju pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan negara maju sebagai pelaksana utama serta mempertimbangkan tingkat pembangunan negara berkembang. [6] **Tujuan Nomor 16** mengupayakan kemajuan dan pendukung masyarakat yang damai, akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang akuntabel dan inklusif dengan target pada 2030, semua warga

⁵⁰ Lihat dokumen lengkap SDGs. dikutip Sugeng Bahagijo, “Janji *Sustainable Development Goals*: Kebebasan, Kesetaraan, dan Ekologi” dalam *Jurnal Prisma*, Vol. 35. No. 2, 20, h. 39.

memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan akta kelahiran. Selain itu pada 2030, Indonesia diharapkan mampu mengurangi aliran keuangan dan pajak ilegal.

Bila dilihat secara mendalam, paparan dokumen di atas bisa dikatakan sudah menunjukkan pengarusutamaan ekofeminisme dalam pembangunan berkelanjutan. Setidaknya, hal tersebut dipaparkan dalam tujuan nomor 3 dan 5 berkenaan dengan perempuan, dan nomor 16 mengenai keadilan. Bagi penulis, langkah ini sangat positif. Sebab, kelebihan ekofeminisme bukan hanya karena ia mampu menerangkan latar belakang subordinasi perempuan, tetapi juga latar belakang kerusakan lingkungan hidup global. Ekofeminisme berupaya melihat masalah sosial, kultural, dan struktural yang berupa dominasi yang sangat kuat dalam relasi antar kelompok manusia dan relasi antar manusia dengan alam. Oleh karenanya, ekofeminisme senantiasa teraktualkan dalam ranah empiris, konseptual dan simbolik, dan epistemologi.⁵¹ Ranah **empiris** berbicara ketidakstabilan lingkungan hidup turut mempengaruhi perempuan di sebagian besar belahan dunia. Hal ini rupanya bertitik tolak dari anggapan bahwa beban perempuan semakin bertambah seiring terjadinya kerusakan lingkungan di mana perempuan menjadi aktor utama dalam mengasuh, terutama menyediakan makanan dan kesehatan anggota keluarga. Setidaknya, tugas ini berpijak pengalaman pembatasan hak perempuan dalam kepemilikan lahan pekerjaan di mana ekofeminisme menilai bahwa struktur ekonomi dan politik telah mengucilkan peran perempuan. Sedangkan, ranah **konseptual dan simbolik** mencoba mengkritisi budaya barat. Bagi ekofeminisme, budaya barat mengembangkan ide-ide yang terbagi secara hierarkis dan dualistik. Struktur konseptual dualistik mengidentifikasikan perempuan dengan feminitas, seksual, alam, dan materialistik, sedangkan laki-laki dipandang dari sisi maskulinitas yang sarat dengan supranatural dan roh tanpa tubuh. Oleh karenanya, kekuasaan kaum laki-laki dimunculkan dalam berbagai dimensi kehidupan, di antaranya sosial, seksual, pendidikan, pemerintahan, dan kekuasaan ekonomi. Kemudian, ranah **epistemologi** mensinyalir perempuan dan alam. Hal tersebut dinyatakan melalui klaim tokoh feminisme bahwa perempuan memiliki pengetahuan dan keahlian lebih besar dibanding laki-laki mengenai sistem bumi. Dengan kata lain, perempuan

⁵¹ Lihat H. Eaton dan E. A. Lorentzen. *Ecofeminism and Globalization: Exploring Culture, Context, and Religion* Boston: Rowman & Littlefield Publisher, 2003. dikutip Andris Noya, "Urgensi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah dalam Mengatasi Krisis Ekologis: Kajian Ekofeminisme" dalam Dewi Candraningrum (ed.). *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya* (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), h. 129.

menempati posisi utama dalam membantu menciptakan paradigma baru tentang ekologi. Perempuan bisa dikatakan sebagai kelompok paling siap mengatasi masalah lingkungan.

Strategi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Perspektif Ekofeminisme

Kalau demikian, bagaimana dengan tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 sebagaimana penerapan pola pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional dengan memperhatikan prinsip, norma, pola pikir, pendekatan, tujuan, dan tata kelola pembangunan? Hal ini dapat diperhatikan berikut ini⁵²; *Pertama*. Pembangunan diutamakan pada aspek lingkungan. Hal ini dikarenakan asumsi dan dalih yang keliru mengenai hubungan ekonomi dan lingkungan yang seolah-olah harus ada *trade off* di antara keduanya. Padahal, keduanya tidak harus saling dipertentangkan karena pembangunan memerlukan pertumbuhan ekonomi maupun daya dukung lingkungan. Pelestarian ekosistem dimungkinkan memperkuat basis ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat. *Kedua*. Pembangunan berkelanjutan bukan sekedar mempertimbangkan adanya tiga dimensi (ekonomi, sosial, dan lingkungan), melainkan meletakkan ketiganya dalam posisi dan peran yang setara dalam proses dan kebijakan pembangunan. Bila dilihat dalam sejarah, pembangunan pola konvensional gagal mencapai tujuan dikarenakan telah meletakkan faktor ekonomi sebagai pertimbangan utama dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi kurang penting. Oleh karenanya, selama isu lingkungan dan sosial belum masuk dalam arus utama kebijakan pembangunan nasional maka tujuan pembangunan bisa dikatakan sulit tercapai. *Ketiga*. Bila kita ingin menempuh pendekatan pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan sebaiknya bukan hanya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan manusia, melainkan generasi yang akan datang. Selain itu, kebijakan pembangunan harus bisa menjamin bahwa basis ekologi dan sosial tidak boleh dikorbankan begitu saja dengan hanya mengejar keuntungan jangka pendek. *Keempat*. Ancaman pemanasan global dan dampak negatif perubahan iklim dimungkinkan berkurang apabila rencana pembangunan sejak dini menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hal ini perlu didorong investasi dan pengembangan teknologi pemanfaatan energi baru dan terbarukan, di antaranya energi panas bumi, tenaga surya, air, angin, ombak, biomassa, dan bioenergi.

⁵² Lihat Ismid Hadad, “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015: Perjalanan Maraton Menuju SDGs 2030”, h. 33-34.

Tentunya, upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim harus dilakukan dengan cara membangun infrastruktur tahan bencana, saluran irigasi dan sistem pertanian cerdas iklim, restorasi lahan gambut, dan sebagainya.

Kelima. Pemanasan global terjadi karena akumulasi energi GRK yang berasal dari pembakaran energi fosil, konversi lahan hutan, dan gambut. Oleh karenanya, fungsi kelembagaan lingkungan perlu memiliki dua prinsip; [1] Kewenangan kuat untuk menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dengan berbagai kementerian atau lembaga. [2] Memiliki komitmen tinggi dan kemampuan untuk mengarusutamakan dimensi dan aspek lingkungan ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional, sektoral, dan regional.

Keenam. Penanggulangan perubahan iklim dan pencapaian tujuan SDGs tidak dilakukan dengan mengandalkan mekanisme harga melalui sistem pasar. Artinya, pasar tidak bisa menangkap sinyal sosial dan lingkungan melalui mekanisme harga karena biaya-biaya sosial tidak diperhitungkan, konflik sosial dan penderitaan manusia tidak bisa ditangkap oleh sistem pasar. Hal ini tentu serupa bagi lingkungan. Kerusakan sumber daya alam dan polusi udara dan air yang membawa kematian manusia tidak boleh dianggap sebagai factor eksternal sehingga tidak masuk dalam struktur dan hitungan biaya produksi. *Ketujuh.* Meskipun perlu peran pemerintah yang efektif untuk bisa mengoreksi kegagalan pasar, pembangunan berkelanjutan memerlukan sistem *checks and balances* dengan didukung oleh kemitraan tiga pihak yang setara antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil yang bersama-sama dapat melakukan koreksi atas pasar, mengisi, dan mengimbangi kelemahan birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik di bidang sosial dan lingkungan. Sebab, keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh cara dan proses pelaksanaannya yang harus bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta mampu menggerakkan peran serta semua pihak.

Kedelapan. Strategi pendanaan untuk perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan perlu dimulai dengan upaya pencegahan dan pengurangan dampak karena biayanya jauh lebih rendah daripada mengatasi masalah yang ditimbulkan. Oleh karenanya, kompleksitas masalah dan solusi guna memenuhi besarnya kebutuhan pendanaan SDGs menghendaki diterapkannya prinsip

efektivitas dan fleksibilitas dalam menentukan mekanisme, model, dan instrument pendanaan yang bisa menggalang, mendorong, dan memanfaatkan semua potensi dan sumber dana yang ada di dalam dan luar negeri, sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. *Kesembilan*. Pergeseran paradigma ke arah pembangunan berkelanjutan turut membutuhkan perubahan nilai dan orientasi masyarakat dan para pelaku pembangunan. Perlu upaya terus-menerus mengembangkan nilai-nilai baru yang sama sekali berbeda dengan pola dan kebiasaan konvensional selama ini. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang mendorong terciptanya nilai-nilai dan orientasi baru tersebut.

Penutup

Melalui uraian di atas, pembangunan berkelanjutan diharapkan tidak hanya berkutat pada persoalan ekonomi saja, melainkan mensinergiskan dan menyetakannya dengan lingkungan hidup dan sosial. Hal ini maksudkan agar lagi-lagi lingkungan hidup tidak menjadi korban atas pemuasan hasrat manusia semata (antroposentris), termasuk laki-laki (androsentris). Pemikiran para filsuf ekofeminisme bisa dijadikan alternatif alarm dalam mengemban misi tersebut, walaupun di dalamnya masih terdapat pro dan kontra dalam memandang hubungan alam dan perempuan. Tapi setidaknya, kita bisa menarik benang merah dan implikasi positif dalam berperilaku etis terhadap lingkungan hidup melalui bingkai pembangunan berkelanjutan yang teraktualkan dalam perumusan hingga pelaksanaan tujuan dan strateginya.

Daftar Pustaka

- Bahagijo, Sugeng. “Janji *Sustainable Development Goals*: Kebebasan, Kesenjangan, dan Ekologi.” *Jurnal Prisma*, Vol. 35. No. 2, 20.
- Danardono, Donny. “Ekofeminisme: Kontradiksi Kapitalisme dan Etika Kepedulian” dalam Dewi Candraningrum (ed.). *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra, 2013.

- Hadad, Ismid. “Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015: Perjalanan Maraton Menuju SDGs 2030.” *Jurnal Prisma*, Vol. 35. No. 2, 20.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Noya, Andris. “Urgensi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah dalam Mengatasi Krisis Ekologis: Kajian Ekofeminisme” dalam Dewi Candraningrum (ed.). *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra, 1998.